

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Tahun 2024

Refli Sepriandito^{1*}, Muniruddin²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Corresponding Author's e-mail : reflisepriandito@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 182-192

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2352>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2352>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

***Abstract** :Public participation in elections is one of the main pillars of democracy; however, the abstention rate (golput) in Indonesia, including in Medan City, remains relatively high. This study aims to analyze the efforts made by the General Election Commission (KPU) of Medan City in increasing public participation in elections. Using a qualitative approach, data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review related to political education and election socialization. The findings show that the KPU of Medan City has implemented various efforts, such as socializing election stages, utilizing social media to reach the younger generation, and collaborating with community organizations and educational institutions. However, the main challenges that persist include the high abstention rate, political apathy, and difficulties in accessing information in remote areas. The KPU of Medan City is required to continuously evaluate and optimize its socialization strategies to effectively improve political participation. Despite indications of increased participation, the role of the KPU in ensuring equal access to information and political education for all community groups especially in underserved areas remains crucial.*

***Keywords** : Voter Participation, Elections, Abstention, Socialization, Social Media, Political Education*

Abstrak : Partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi, namun angka golput (golongan putih) di Indonesia, termasuk di Kota Medan, masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi serta kajian literatur terkait sosialisasi dan edukasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Medan telah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi tahapan Pemilu, penggunaan media sosial untuk menjangkau generasi muda, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah tingginya angka golput, apatisme politik, serta kesulitan dalam mengakses informasi di daerah terpencil. KPU Kota Medan dihadapkan pada kebutuhan untuk terus mengevaluasi dan mengoptimalkan strategi sosialisasi agar dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara lebih efektif. Meskipun ada peningkatan partisipasi, peran KPU dalam memastikan pemerataan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah kurang terjangkau, tetap sangat diperlukan.

Kata Kunci : Partisipasi Pemilih, Pemilu, KPU Kota Medan, Golput, Sosialisasi, Media Sosial, Edukasi Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu

tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan (Yasin, 2022). Masyarakat memiliki peran penting dalam proses ini, di mana partisipasi aktif mereka menjadi indikator legitimasi pemerintahan yang terpilih. Namun, tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di tingkat lokal seperti Kota Medan, masih menjadi isu yang perlu diatasi (Avivah & Haryanti, 2023).

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, dan nilai-nilai agama ini sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pemilihan pemimpin. Dalam Islam, pemilihan pemimpin dianggap sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan syarat-syarat tertentu, seperti keimanan, kejujuran, dan integritas calon pemimpin (Sodikin, 2019). Hal ini sejalan dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa seIndonesia yang menekankan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan prinsip-prinsip syariat untuk mencapai kemaslahatan bersama (Niam, 2023).

Sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam surat Q.s. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”* (Q.s. An-Nisa ayat 58)

Namun, meskipun pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu sudah sangat jelas, tantangan dalam meningkatkan tingkat keterlibatan pemilih tetap ada. Berbagai faktor seperti apatisisme politik, kurangnya pengetahuan tentang proses pemilu, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik sering kali menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih (Septiana & Mulyana, 2023).

Gleko *et al.*, (2017) *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”* Penelitian ini menemukan bahwa strategi KPU Kabupaten Malang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilu 2015 mencakup tiga tahapan: formulasi perencanaan sosialisasi yang jelas, pelaksanaan sosialisasi kepada delapan segmen pemilih melalui tatap muka dan media massa, serta alokasi sumber daya melalui bimbingan teknis kepada panitia ad hoc. Kendala utama meliputi minimnya anggaran, sikap apatis masyarakat, dan keterbatasan personel KPU.

Hasibuan *et al.*, (2018), *“Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018”* Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi KPU Sumatera Utara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur 2018 meliputi formulasi perencanaan, pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih, dan bimbingan teknis kepada panitia. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia di daerah.

Arniti, (2020) *“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar”* Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kota Denpasar dipengaruhi oleh kedekatan emosional calon dengan pemilih, pengaruh lembaga sosial seperti kepala desa dan tokoh agama, serta rasionalitas masyarakat yang mempertimbangkan aspek

ekonomi dan politik uang. Sosialisasi politik menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi.

Akhmaddhian *et al.*, (2021) “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari” Penelitian ini menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan pemilu untuk mewujudkan pemilu berkualitas. Program seperti Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi dan Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek sosialisasi secara umum dan pelaksanaan pemilu di daerah tertentu seperti Kabupaten Malang, Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Denpasar. Penelitian terdahulu juga lebih banyak menyoroti bentuk strategi sosialisasi, faktor partisipasi politik, serta pengawasan pemilu, namun belum secara spesifik mengkaji efektivitas strategi KPU Kota Medan dalam menghadapi tantangan Pemilu 2024 yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, penyebaran hoaks, apatisme politik, dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Selain itu, penelitian sebelumnya belum banyak membahas bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi KPU Kota Medan dalam menjangkau kelompok rentan seperti pemilih muda, lansia, dan penyandang disabilitas melalui pendekatan digital dan kolaboratif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara lebih mendalam strategi, peluang, serta tantangan yang dihadapi KPU Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Kota Medan, serta untuk mengeksplorasi strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh KPU Kota Medan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk merumuskan solusi yang efektif guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana strategi efektif KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum di Kota Medan? dan (2) Bagaimana peluang serta tantangan yang dihadapi KPU dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 di Kota Medan?. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi konkret bagi KPU Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu mendatang. Dengan pendekatan serta strategi sosialisasi yang dilakukan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi di Kota Medan khususnya dan Indonesia secara umum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau tidak tertulis dari orang-orang serta perilaku yang diamati (Waruwu, 2023). Penelitian ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, tepatnya di Jl. Kejaksaan No.37, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Penelitian ini dilaksanakan pada 11 Desember 2024. Informan dalam penelitian ini bersumber dari ketua atau perangkat struktural di KPU Kota Medan dan masyarakat sebagai sampel untuk memahami perspektif masyarakat terkait partisipasi dalam pemilihan umum.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	2024												2025					Ket.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
1.	Pengajuan Judul	■																	
2.	Bimbingan Proposal		■	■	■														
3.	Bimbingan Proposan/Artikel				■	■	■												
4.	Bimbingan Artikel							■											
5.	ACC Jurnal													■					

Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam penelitian karena tujuannya adalah memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pihak yang memiliki pengalaman dan keterkaitan dengan pemilu, khususnya dari anggota Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Parmas dan anggota Komisioner KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Wawancara bertujuan untuk memverifikasi dan memperluas data atau informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh peneliti untuk memilih fenomena atau masalah penelitian serta untuk menentukan cakupan wilayah penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti mencatat informasi yang diamati selama penelitian. Subyektivitas dalam memahami fakta dapat mempengaruhi proses penelitian. Hasil pengamatan ini menjadi bagian dari data penelitian.

3. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi langsung, peneliti juga mengumpulkan data berupa dokumentasi, seperti foto-foto kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan kepada pemilih dan data dukung lainnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar, serta dokumentasi (Sugiyono, 2018). Menurut Miles & Huberman, (2009) proses analisis terdiri dari tiga kegiatan yang dilakukan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

❖ Reduksi

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang berasal dari catatan lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama proyek penelitian berlangsung. Tujuannya adalah agar data dapat diorganisir dengan baik untuk memungkinkan penarikan kesimpulan yang valid tanpa perlu mengonversi data menjadi angka.

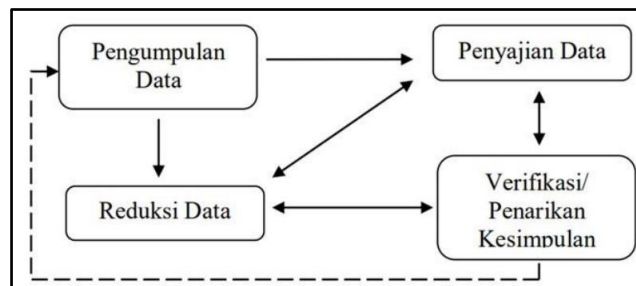
❖ Penyajian

Penyajian data, menurut Miles & Huberman, melibatkan penyusunan informasi yang terstruktur agar memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka mempercayai bahwa penyajian yang baik merupakan kunci untuk analisis kualitatif yang valid, yang dapat berupa berbagai jenis matriks, grafik, dan bagan untuk menggabungkan informasi secara komprehensif.

❖ Penarikan Kesimpulan

Proses terakhir adalah penarikan kesimpulan, yang merupakan bagian dari konfigurasi analisis data yang utuh. Kesimpulan yang ditarik juga harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, baik melalui pemikiran ulang oleh peneliti, peninjauan kembali catatan lapangan, maupun diskusi dengan rekan sejawat untuk menguji kebenaran, kekokohan, dan kesesuaian makna yang muncul dari data lain.

Gambar 1: Desain Analisis Data



HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Sosialisasi dan Edukasi Politik KPU Kota Medan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

KPU Kota Medan melaksanakan berbagai bentuk sosialisasi yang melibatkan masyarakat secara luas, yang mencakup tahapan-tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pendataan pemilih, hingga tahapan kampanye calon. Selain itu, KPU juga berfokus pada edukasi terkait prosedur pemilihan dan pentingnya mengikuti perkembangan isu terkini serta metode yang mudah dijangkau dan dipahami oleh semua kalangan.

Bapak Bobby Niedal Dalimunthe menjelaskan, *“Kegiatan sosialisasi yang dilakukan sesuai dengan tahapan pemilihan, termasuk sosialisasi tentang jadwal, pendaftaran, pendataan pemilih, serta kampanye calon. Karena situasi pandemi, kami juga menambahkan sosialisasi mengenai new normal, seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan penggunaan hand sanitizer.”*

Dari penjelasan ini, bahwa KPU Kota Medan mengintegrasikan sosialisasi terkait prosedur pemilihan dengan sosialisasi protokol kesehatan, dengan tujuan agar masyarakat tetap aman dalam melaksanakan hak pilihnya di masa pandemi.

Sejalan dengan itu Alifa & Ananta (2023) menyampaikan bahwa melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU, pemilih pemula dapat lebih siap untuk menggunakan hak pilih mereka, serta menjadi langkah positif untuk kemajuan bangsa dan negara dalam proses penentuan dan pengambilan keputusan.

KPU Kota Medan berkomitmen untuk menjangkau berbagai kalangan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, baik yang berbasis agama, ras, suku, maupun usia. Hal ini merupakan bagian dari strategi inklusif yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak pemilih dari berbagai latar belakang.

Bapak Bobby menyatakan, *“Setiap organisasi yang memiliki massa besar, baik berdasarkan agama, ras, suku, maupun usia, diberi kesempatan untuk mengajukan kerja sama dengan KPU. Kami menyediakan pemateri untuk menjelaskan tahapan pemilu di organisasi tersebut.”*

Dengan melibatkan organisasi-organisasi ini, KPU dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan memastikan bahwa informasi terkait Pemilu sampai kepada masyarakat yang mungkin kurang mendapatkan akses ke informasi lainnya.

Penelitian oleh Rahman (2023) menyoroti bahwa KPU Kota Medan menggunakan strategi inklusif untuk mengatasi golput dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah kerja sama dengan universitas, SMA, dan organisasi masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang tahapan pemilu secara langsung kepada kelompok sasaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Bobby bahwa organisasi berbasis massa diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan KPU guna menjangkau audiens yang lebih luas.

Sejalan dengan itu juga Zalukhu (2021) menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan. Dalam Pilkada Kota Medan 2020, KPU melakukan upaya maksimal untuk melibatkan berbagai komunitas, sehingga berhasil meningkatkan partisipasi dibandingkan Pilkada sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi dengan komunitas berbasis agama, ras, dan usia efektif dalam menyampaikan informasi pemilu kepada masyarakat luas.

KPU Kota Medan berkomitmen untuk menjangkau berbagai kalangan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam sosialisasi pemilu untuk memastikan semua lapisan masyarakat terlibat (Lasida, 2019). Namun, dalam kajian berbeda menunjukkan bahwa meskipun pendekatan ini baik secara teori, implementasinya sering kali tidak terorganisir dengan baik, sehingga dampaknya tidak maksimal (Shabrina *et al.*, 2025; Rahmadani & Khairani, 2025).

Program pendidikan politik juga dilaksanakan, dengan melibatkan relawan demokrasi untuk mendekati masyarakat secara langsung (Daulay, 2021). Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam proses sosialisasi dan pelaksanaan pemilu juga menjadi salah satu strategi. KPU berusaha untuk membangun kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan generasi muda (Siregar, 2022).

B. Pemanfaatan Media Digital dan Pendekatan Inklusif dalam Sosialisasi Pemilu

KPU Kota Medan juga memastikan bahwa pemilih yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti pemilih muda, lansia, dan penyandang disabilitas, dapat mengakses informasi dengan mudah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mendatangi organisasi-organisasi yang menangani disabilitas, kelompok muda, dan lansia untuk memberikan edukasi terkait hak pilih mereka.

Menurut Bapak Bobby, *“Jika ada pemilih yang tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara karena sakit atau kondisi fisik lainnya, mereka masih bisa menggunakan hak pilih mereka dengan surat keterangan yang dapat diproses sebelum hari pemilihan.”*

Langkah ini menunjukkan perhatian KPU terhadap kelompok rentan, memastikan bahwa mereka tidak terhambat dalam menggunakan hak pilihnya karena keterbatasan fisik atau lainnya.

KPU Kota Medan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau generasi muda, yang sebagian besar aktif di platform-platform digital. Dengan menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook, KPU menciptakan konten yang menarik dan relevan, sehingga generasi muda tertarik untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Bapak Bobby menyatakan, *“Kami memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kepada generasi muda. Kami membuat konten yang relevan dan menarik agar mereka tertarik untuk berpartisipasi dalam pemilu.”*

Hal ini menandakan bahwa KPU Kota Medan beradaptasi dengan tren komunikasi digital yang lebih banyak digunakan oleh kalangan muda, sehingga lebih efektif dalam menarik perhatian mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahsani (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi melalui media sosial oleh KPU Kota Medan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan pemilih pemula. Penelitian ini menekankan bahwa penggunaan platform digital memiliki pengaruh yang kuat terhadap keterlibatan pemilih muda, yang merupakan kelompok penting dalam pemilu. Selain itu, studi lain juga mencatat bahwa sosialisasi yang dilakukan secara langsung ke masyarakat, seperti yang dilakukan oleh KPU di kampus-kampus dan lembaga pemasyarakatan, dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih (Kabar UPT, 2024; Juraidi, 2019).

KPU memanfaatkan teknologi informasi untuk memperbarui data pemilih dan mempermudah akses informasi mengenai pemilu. Ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan informasi yang sering menjadi penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi (Wirdani, 2023).

Berita palsu atau hoax yang beredar menjelang Pemilu dapat memengaruhi keputusan pemilih dan merugikan integritas Pemilu itu sendiri. KPU Kota Medan menggunakan media sosial untuk menangkal informasi yang salah dan memberikan klarifikasi secara langsung.

Bapak Bobby menjelaskan, *“Kami memiliki media sosial yang dapat kami gunakan untuk meng-counter setiap isu-isu yang viral dan memberikan klarifikasi secara resmi dan KPU memastikan informasi yang disampaikan berdasarkan peraturan dari KPU itu sendiri yang bersifat akurat.”*

Ini menunjukkan bahwa KPU Kota Medan memiliki strategi proaktif dalam menghadapi penyebaran informasi yang salah, sehingga pemilih dapat mendapatkan informasi yang benar dan akurat. KPU tidak hanya mengandalkan metode tradisional dalam sosialisasi, tetapi juga memanfaatkan kekuatan media sosial untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda yang lebih aktif di platform-platform digital.

Dalam Putri *et al.* (2024) disampaikan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu responsif dalam menanggapi segala bentuk penyimpangan kampanye. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab, Bawaslu dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, salah satunya melalui penerimaan laporan terkait penyimpangan kampanye yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu melalui saluran yang telah disediakan. Dalam hal ini Bawaslu termasuk juga KPU harus benar-benar memastikan seluruh prosedur, berita yang beredar serta seluruh aspek yang terlibat di dalam pemilu dalam pengawasan.

C. Tantangan dan Hambatan KPU Kota Medan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kendala utama dalam meningkatkan jumlah pemilih sering kali terkait dengan apatisisme politik dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam pemilu. Bapak Bobby menjelaskan bahwa partisipasi pemilih merupakan hak, bukan kewajiban, sehingga KPU tidak dapat memaksa masyarakat untuk memilih. Oleh karena itu, KPU berfokus pada penyediaan informasi yang cukup agar masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional.

“Di Kota Medan, masyarakat memiliki pemikiran rasional. Kami tidak bisa memaksa mereka untuk memilih, namun kami terus memberikan informasi yang diperlukan untuk membantu mereka menggunakan hak pilih mereka,” ujar Bapak Bobby.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kota Medan mengedepankan pendekatan yang menghormati kebebasan individu, tetapi tetap berusaha untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam Pemilu.

Salah satu hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi adalah faktor psikologis seperti prasangka dan motivasi individu. Penelitian Ahsani (2022) mencatat bahwa kepentingan pribadi dan stereotip dapat menghalangi efektivitas sosialisasi. Ini menunjukkan bahwa meskipun KPU telah melakukan berbagai upaya untuk mendidik masyarakat tentang hak pilih mereka, faktor-faktor eksternal tetap memengaruhi tingkat partisipasi.

KPU Kota Medan juga menghadapi beberapa tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tingkat golput yang tinggi menunjukkan bahwa banyak warga masih enggan untuk memberikan suara. Hal ini sering kali disebabkan oleh kurangnya minat terhadap calon yang ada atau ketidakpercayaan terhadap sistem politik (Siregar, 2022).

Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan bagi KPU dalam melaksanakan program-program sosialisasi secara efektif (Hasibuan *et al.*, 2018). Namun, terdapat juga kritik terhadap efektivitas sosialisasi KPU. Penelitian oleh KPUD Kota Medan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menyebarluaskan informasi, masih ada masalah signifikan seperti rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai tahapan pemilu dan kurangnya akses informasi di daerah terpencil (Fahrizl, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa meski ada upaya yang dilakukan, tantangan struktural seperti jarak dan apatisme politik tetap menjadi penghalang utama dalam meningkatkan partisipasi

D. Evaluasi Program dan Efektivitas Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih

KPU Kota Medan juga melakukan evaluasi terhadap efektivitas program sosialisasi mereka. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari badan ad hoc serta melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui alasan di balik rendahnya partisipasi masyarakat.

“KPU mengevaluasi program mereka melalui badan ad hoc yaitu menjaring informasi apa alasan masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya,” ungkap Bapak Bobby.

Dengan adanya evaluasi ini, KPU dapat mengidentifikasi hambatan yang ada dan merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih di masa depan.

Visi dan misi KPU Kota Medan adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

Visi ini diungkapkan dengan jelas oleh Bapak Bobby, *“Visi kami adalah 'Rakyat Memilih, Rakyat Menentukan.’”*

Visi ini mencerminkan komitmen KPU untuk menciptakan proses pemilu yang transparan dan adil, di mana setiap suara masyarakat dihargai dan berperan dalam menentukan arah masa depan daerah. Dalam hal ini KPU merupakan penyelenggara, pengawas sekaligus fasilitator agar setiap masyarakat dengan aman, nyaman dan tanpa tekanan dari sudut manapun untuk menyampaikan suaranya baik dalam hal aspirasi publik terkhusus penyelenggaraan pemungutan suara dalam pemilihan umum. Sebagaimana ditemukan dalam Jurdi (2019) bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai suatu badan khusus dibentuk untuk merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan Pemilu dan pemilihan di Indonesia.

Beberapa strategi yang dilakukan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di antaranya adalah sosialisasi dan edukasi politik melalui berbagai media, termasuk media sosial dan media massa untuk menjangkau segmen yang lebih luas dari masyarakat (Wirdani, 2023), pemanfaatan teknologi informasi untuk memperbarui data pemilih dan mempermudah akses

informasi mengenai pemilu (Wirdani, 2023), serta pendekatan komunitas melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan (Siregar, 2022).

Hasil di atas menunjukkan adanya peningkatan partisipasi, meskipun tidak selalu signifikan. Misalnya, pada Pilkada Serentak 2020, meskipun ada upaya keras dari KPU, tingkat partisipasi masih berada di bawah harapan, dengan banyak pemilih pemula yang belum sepenuhnya terlibat. KPU Kota Medan terus berupaya mengevaluasi strategi yang ada dan mencari cara baru untuk melibatkan lebih banyak warga dalam proses demokrasi, dengan harapan bahwa kesadaran politik akan terus meningkat di masa depan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan terbukti menjadi upaya strategis dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dengan melibatkan berbagai kalangan melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat, KPU Kota Medan berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk kelompok rentan seperti pemilih muda, lansia, dan penyandang disabilitas. KPU juga memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi terkait Pemilu, yang terbukti efektif dalam menarik perhatian generasi muda yang lebih aktif di platform digital. Meskipun demikian, tantangan besar tetap ada, seperti tingginya tingkat golput yang disebabkan oleh apatisisme politik, kurangnya pengetahuan mengenai tahapan Pemilu, serta ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Selain itu, kendala sumber daya, baik manusia maupun anggaran, turut memengaruhi efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap setiap program dan upaya penyebaran informasi yang lebih luas dan inklusif menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu di masa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi yang diterapkan KPU Kota Medan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 dilakukan melalui sosialisasi berbasis komunitas, pemanfaatan media sosial, edukasi politik, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok rentan seperti pemilih pemula, penyandang disabilitas, dan lansia. Pendekatan inklusif ini menunjukkan bahwa KPU tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada upaya memperluas jangkauan edukasi politik agar masyarakat memiliki kesadaran rasional dalam menggunakan hak pilih. Penggunaan teknologi digital juga menjadi salah satu strategi penting yang terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda sebagai segmen pemilih yang potensial.

Namun, KPU Kota Medan masih menghadapi tantangan serius seperti tingginya angka golput, apatisisme politik, keterbatasan sumber daya, serta persebaran informasi yang belum merata. Selain itu, faktor psikologis seperti ketidakpercayaan terhadap sistem politik dan penyebaran hoaks turut memperlemah partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun strategi KPU sudah berada di jalur yang tepat, diperlukan evaluasi dan penguatan program sosialisasi yang lebih intensif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Optimalisasi edukasi politik berbasis komunitas dan pemerataan akses informasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan partisipasi demokratis masyarakat Kota Medan pada pemilu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsani, F. (2022). *Efektivitas Sosialisasi Pemilih Pemula Melalui Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2020* [Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19112>
- Akhmaddhian, S., Yuhandra, E., & Andriyani, Y. (2021). Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas Suwari. *Prosiding Conference On Law*

- and *Social Studies*, 1—10. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Alifa, Q. L., & Ananta, C. S. (2023). Sosialisasi KPU (Komisi Pemilihan Umum) Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Blitar. *Prosiding Seminar Nasional*, 2, 1538–1543.
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Avivah, H., & Haryanti, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa (JMKB)*, 3(1), 14–21.
- Daulay, K. U. (2021). *Strategi Humas Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati Priode Tahun 2020-2024 Kabupaten Labuhanbatu*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.
- Fahrizl, A. (2018). *Efektivitas Sosialisasi Pilkada Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kpu Kota Medan* [Universitas Muhammadiyah SUMATERA UTARA]. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3493>
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 40. www.publikasi.unitri.ac.id
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2519>
- Juraidi. (2019). KPU Kota Medan maksimalkan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/786529/kpu-kota-medan-maksimalkan-sosialisasi-pemilu-kepada-masyarakat>
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. www.Journal.kpu.go.id
- Kabar UPT. (2024, November 21). Beri Edukasi, KPU Kota Medan Gelar Sosialisasi Pemungutan Suara Pilkada bagi WBP di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan. *Lppmedan.Kemenkumham.Go.Id*. <https://lppmedan.kemenkumham.go.id/>
- Lasida, I. G. G. M. G. (2019). Membangun Pemilu Inklusif Untuk Difabel (Studi Kasus Pilwali Kota Yogyakarta 2017). *Kompilasi Ringkasan Tesis Tata Kelola Pemilu*, 1, 131–153.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Niam. (2023). *Kewajiban Umat Pilih Pemimpin yang Ideal dan Bertanggungjawab*. Muidigital. <https://mui.or.id/>
- Putri, L. U. M., Febrianti, A., Elonika, Y., & Winarti, N. (2024). Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.14710/jiip.v9i1.21741>
- Rahmadani, C. M., & Khairani. (2025). Penyelenggaraan Pemilu yang Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh (Di Tinjau dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas). *As-Siyadah: Jurnal Politik Dan Hukum Tata Negara*, 5(1), 17–39. <https://doi.org/10.22373/as-siyadah.v5i2.7548>
- Rahman, A. F. (2023). *Peran Kpu Dalam Mengatasi Angka Golput Serta Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat: (Studi Penelitian di KPU Daerah Kota Medan)* [Universitas

- Pembangunan Panca Budi]. <https://repository.pancabudi.ac.id/website/detail/26961>
- Septiana, L., & Mulyana, M. (2023). Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pelaksanaan Program Sosialisasi Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 5(2), 91–105. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v5i2.3555>
- Shabrina, H. N., Dewi, I. P., & Rahman, A. (2025). Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu Inklusif bagi Kelompok Rentan di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 1738–1744. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1450>
- Siregar, I. R. (2022). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Serentak Pada Tahun 2020 (Studi Penelitian Di Komisi Pemilihan Umum Kota Medan)*. Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
- Sodikin, S. (2019). Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(1), 59–66. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2848>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wirdani, A. (2023). *Strategi KPU Kota Medan dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Pemutakhiran Data Pemilih (Studi Kasus Pilkada Kota Medan Tahun 2020)*. Universitas Sumatera Utara.
- Yasin, R. (2022). Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 186–199. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>
- Zalukhu, N. N. (2021). *Peranan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Kasus Pilkada Wali Kota Medan Tahun 2020)*. Universitas HKBP Nommensen.